

Soni



Pendidikan dan Kebudayaan:

KETAMANSISWAAN PANCASILA KEINDONESIAAN

Bahan untuk Pembekalan pada acara
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan untuk Pamong UST
Yogyakarta, 18-23 Mei 2015

Oleh:

SRI-EDI SWASONO

(Guru Besar Universitas Indonesia, Penasihat Menteri PPN/BAPPENAS,
Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa)

**MAJELIS LUHUR PERSATUAN TAMANSISWA
2015**



**Pendidikan dan Kebudayaan:
TAMANSISWA, PANCASILA DAN KEINDONESIAAN
Oleh: Sri-Edi Swasono**

Pengantar

Kita sedang memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2015 (bertepatan dengan ulang tahun Ki Hadjar Dewantara), dan juga menyongsong Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2015. Demikian itu barangkali saya boleh menduga bahwa undangan untuk memberi “pembekalan” pada saat ini, yang terkait dengan acara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan untuk Pamong UST adalah semacam undangan pertanggungjawaban terhadap saya selaku Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa untuk menjelaskan dan menegaskan mengenai Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan yang menyertai kemerdekaan Indonesia.

Tamansiswa sebagai Badan Perjuangan

Sebagai Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa saya perlu menyampaikan di forum ini mengenai Tamansiswa dan ketamansiswaan. Visi Tamansiswa adalah terwujudnya badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas sebagai sarana membangun masyarakat tertib, damai, salam dan bahagia, serta tangguh dan berjaya. Visi ini menjadi ruh kehidupan Tamansiswa yang hampir berusia 100 tahun sejak didirikannya pada 3 Juli 1922, sebagai *Nationaal Instituut Onderwijs Tamansiswa* atau Perguruan Nasional Tamansiswa.

Misi Tamansiswa adalah melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, mewujudkan kenasionalan, dan tentu pula sesuai dengan visinya di atas adalah untuk mewujudkan masyarakat tertib, damai, salam dan bahagia sesuai dengan cita-cita tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, mempertajam daya cipta, rasa dan karsa menuju pembangunan manusia merdeka lahir dan batin, berpekerti luhur serta tinggi harkat martabat kemanusiaannya. Tamansiswa menempatkan misi pendidikan sebagai pencerahan budaya dan mempertebal keindonesiaan.¹⁾

Dengan demikian Tamansiswa dalam kiprahnya bukanlah sekedar lembaga pendidikan dan kebudayaan yang memperjuangkan keindonesiaan, tetapi merupakan lembaga perjuangan yang senantiasa tanpa henti memperluas kemampuan rakyat untuk melepaskan diri dari *kebodohan, keterbelakangan* dan *kemiskinan*.

Oleh karena itu Tamansiswa sebagaimana ditegaskan oleh Sri Sultan HB X (2012), merupakan "Pilar Keistimewaan Ketiga Pendidikan Ngayogyakarta Hadiningrat". Sri Sultan HB X menegaskan pula Ki Hadjar Dewantara adalah pendidik yang berpedoman pada *humanisme*, artinya pendidikan adalah "*memanusiakan manusia*".

Berdirinya Tamansiswa

Ki Hadjar Dewantara sejak usia 16 tahun sudah berkiprah, memperluas pergaulannya dengan tokoh-tokoh perjuangan nasional tatkala mengikuti pendidikan di STOVIA Jakarta. Sewaktu Boedi Oetomo didirikan Ki Hadjar aktif di dalamnya bertugas di bidang propaganda. Ki Hadjar juga aktif di Sarekat Islam dan menjadi pendiri Indische Partij. Melalui pers Ki Hadjar banyak menulis tentang semangat joang. Tulisannya yang berjudul "*Als Ik Eens Nederlander Was*" (Andaikan Aku Seorang Belanda) membuat Kerajaan Belanda dan pemerintah Hindia-Belanda

¹⁾ Visi dan misi ini saya ungkapkan demikian berdasar catatan-catatan yang ada di lingkungan Tamansiswa dan kehidupan ketamansiswaan yang saya lihat dan rasakan.

marah besar. Akibatnya Ki Hadjar dibuang ke Negeri Belanda. Tulisan Ki Hadjar ini dengan keras menyindir Kerajaan Belanda dan orang-orang Belanda yang mestinya malu memperingati 100 Tahun Kemerdekaan Negeri Belanda di tanah jajahannya di Hindia-Belanda. Pada tahun 1921 Ki Hadjar Dewantara pulang kembali ke Tanah-Air.

Tamansiswa lahir pada tahun 1922 dalam kondisi bangsa Indonesia yang dijajah oleh kolonialisme Belanda. Keterjajahan dan kenyataan kolonial kejam yang dipraktekan terhadap rakyat Indonesia ini menimbulkan semangat menolak kolonialisme dari sekelompok tokoh, yaitu RM Soewardi Soerjaningrat (yang kemudian menjadi Ki Hadjar Dewantara), Ki Ageng Soerjomataram, RM Soetatmo Soerjokusumo, Ki Soetopo Wonobojo, Ki Gondoatmodjo, Ki Prawirowiworo, Ki Pronowidigdo, BRM Soebono dan RMH Soerjopoetro. Mereka semua membentuk paguyuban "Selasa Kliwonan" (disingkat "Sa-Ka" – aksara Jawa) yang artinya "tiang", yaitu tiang masyarakat.

Selasa Kliwonan adalah Selapanan, yang berarti 35 hari atau tujuh kali lima "hari Jawa". Tujuan Selasa Kliwonan adalah (1). Mempelajari keadaan rakyat Hindia-Belanda yang terjajah dan; (2). Mencari jalan keluar bagaimana caranya menegakkan kepribadian dan mengisi jiwanya. Dari situ disimpulkan dalam satu cita-cita: *memayu hayuning salira* (membahagiakan diri), *memayu hayuning bangsa* (membahagiakan bangsa), *memayu hayuning bawana* (membahagiakan umat manusia dunia).

Ki Hadjar Dewantara tentu dikenal sebagai tokoh pendidikan luar biasa dan tentu yang sekaligus kontroversial. UNESCO mencatat hal ini. Betapa tidak, beliau mendirikan sekolah di tengah-tengah masa penjajahan untuk mengusir penjajah. Suatu keberanian luar biasa. Ini mengingatkan pula pada keberanian pemuda Hatta yang pada usia 25 tahun menuding Majelis Hakim yang menghakiminya di Pengadilan Den Haag dengan mengatakan, "...lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain...".

Ketika Hatta tiba di Tanah-Air 1932 di Jakarta perhatian umum tertuju pada kegiatan menentang Ordonansi Sekolah Liar

(*Wilde Scholen Ordonnantie*) yang sejak 1 Oktober 1932 akan berlaku bagi semua sekolah swasta yang akan didirikan dan 1 tahun kemudian peraturan ini akan berlaku untuk semua sekolah swasta yang telah ada. Dari ordonansi itu hampir-hampir tidak ada satu pun sekolah nasional yang dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Tamansiswa menentang peraturan itu. Demikian pula Boedi Oetomo mengumumkan jika tanggal 31 Maret ordonansi itu tidak dibatalkan, maka Boedi Oetomo akan menarik semua anggotanya yang ada di dalam Volksraad. Akhirnya Ordonansi Sekolah Liar ini dicabut (Hatta, 1974).

Ajaran Tamansiswa

Secara substansif ketamansiswaan adalah ajaran hidup Ki Hadjar yang dijunjung tinggi oleh Tamansiswa, berupa asas, sendi organisasi, sistem pendidikan, serta cara-cara dan kebiasaan hidup. Namun Ki Hadjar sendiri mengingatkan jangan sampai terjadi kultus individu, jangan sampai ada *dewantaraisme* ataupun *dewantaraleer* ataupun *dewantaramethode*, sebut saja kesemuanya itu ketamansiswaan.

Dasar-Dasar Pendidikan

Pada pembukaan *Taman Lare* (Taman Indria/Taman Kanak-Kanak) tahun 1932, di hadapan orangtua siswa dan tokoh masyarakat, Ki Hadjar menyampaikan pidato yang garis besarnya adalah: (1). Bahwa pendidikan itu berguna untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan anak lahir dan batinnya; (2). Bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menyiapkan generasi muda (keturunan manusia) agar dapat melestarikan kebudayaan bangsanya; (3). Bahwa pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda hanya untuk kebutuhan pegawai rendahan Pemerintah Kolonial, jadi tidak untuk memenuhi kebutuhan bangsa sendiri; (4). Bahwa akibat pendidikan kolonial tadi, nasib rakyat menjadi tergantung kepada Pemerintah Kolonial, tidak mempunyai kemerdekaan diri (mandiri); (5). Bahwa karena sebagian rakyat kita tidak mempunyai kemerdekaan lahir dan batin, maka hidupnya terjajah dan menjadi sengsara serta miskin; (6). Bahwa untuk merebut

kemerdekaan diri dari tangan penjajah Belanda, kita perlu mendidik anak-anak Indonesia agar berjiwa merdeka lahir batin. Dengan rakyat yang merdeka lahir batin, dapat memperkuat pergerakan politik menuju kemerdekaan bangsa; (7). Bahwa pendidikan Tamansiswa berdasarkan kebudayaan bangsa sendiri dan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Segala biaya diusahakan sendiri, tidak menggantungkan diri kepada pihak lain. Karena Tamansiswa berjuang untuk kepentingan rakyat dan berdasarkan kebudayaan bangsa sendiri, maka Tamansiswa melaksanakan pendidikan nasional dan menjadi perintis pendidikan nasional di Indonesia.

Beberapa Konsepsi

Beberapa pandangan yang sifatnya konsepsional dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Bidang Pendidikan: *Tri Pusat Pendidikan*
Tri pusat pendidikan meliputi 3 pusat pendidikan, yaitu pendidikan oleh dan diperoleh dari *keluarga*, pendidikan oleh dan diperoleh dari *sekolah* dan pendidikan oleh dan diperoleh dari *masyarakat*.
- b. Bidang Kebudayaan: *Trikon*
Konsepsi *Trikon* meliputi *kontinuitas*, *konvergenitas*, *konsentrisitas*.
Kontinuitas dimaknai sebagai kewajiban kita untuk senantiasa menjaga nilai-nilai budaya sendiri dan melanjutkannya serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. *Konvergenitas* maknanya adalah memungkinkannya terbuka peluang dialog budaya antara budaya kita dengan budaya asing hingga terjadi persenyawaan budaya baru yang berbasis nasional. *Konsentrisitas* dimaksudkan bahwa budaya baru yang tercipta itu adalah budaya inovatif-konstruktif yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
- c. Bidang Kemasyarakatan: *Trilogi Kepemimpinan*
Konsepsi *Trilogi Kepemimpinan* ini telah dikenal luas, yaitu *ing ngarsa sung tuladha* (dalam menghadapi

tugas nasional berat pemimpin berada di depan), *ing madya mangun karsa* (dalam membangun pemimpin berada di tengah-tengah melibatkan diri memberi inspirasi dan motivasi kepada rakyat), *tutwuri handayani* (dari belakang memberi kekuatan dan kemampuan kepada rakyat).

Beberapa Pedoman Operasional

- *Tri Pantangan*, meliputi pantang menyalahgunakan kekuasaan, pantang menyalahgunakan keuangan, pantang melanggar kesusilaan.
- *Tri Sakti Jiwa*, meliputi *cipta, rasa, karsa*.
- *Tri Nga*, meliputi *ngerti, ngrasa, nglakoni*.
- *Tri Juang*, meliputi berjuang memberantas *kebo-dohan, kemiskinan, ketertinggalan*.
- *Tri N*, meliputi *niteni, nirokke, nambahi*.

Beberapa Fatwa

- *Lawan sastra ngesti mulya*, artinya: dengan ilmu pengetahuan/budaya mencita-citakan kebahagiaan dan kesejahteraan.
- *Suci tata ngesti tunggal*, artinya: dengan suci hati dan keteraturan tertib mencita-citakan persatuan dan kesempurnaan.
- *Ning-neng-nung-nang*, artinya: *ning* dari kata *hening*, tenang; *neng* dari kata *meneng*; *nung* dari kata *hanung*, teguh, kuat, sentosa; *nang* artinya menang. Dengan fikiran yang hening, tenang, diam tidak emosional, memiliki ketangguhan hati akhirnya memperoleh kemenangan.
- *Ngandel-kendel-bandel-kandel*, artinya: *ngandel*, percaya kepada Tuhan, percaya diri; *kendel*, berani karena benar; *bandel*, tahan banting tidak lekas putus asa; *kandel*, tebal kepercayaan dan tebal iman.
- *Bibit-bebet-bobot*, artinya: dalam membentuk keluarga yang baik dan sejahtera perlu memperhatikan

bibit dari calon pengantin; *bebet* asal-usul orangtua yang menurunkan; *bobot* atau berat, mutu, kualitas kedua belah pihak, harus seimbang.

- *Hak diri untuk menuntut salam dan bahagia*, artinya: setiap orang diakui memiliki hak untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.
- *Alam hidup manusia adalah alam hidup perbuatan*, artinya manusia hidupnya tidak terlepas dari keadaan alam, ekologi dan penyatuan dengan alam itulah yang berbahagia.
- *Dengan bebas dari segala ikatan dan dalam kesucian kita berhamba kepada Sang Anak*.
- *Tetep-antep-mantep*, artinya: *tetep* berketetapan hati, pendirian tak tergoyahkan; *antep* berat berbobot, bermutu; *mantep* tetap pada pilihannya.

Ideologi Pancasila dan Pancadharma

Sebagai seorang nasionalis dan akademisi dari Universitas Indonesia saya perlu pula menjelaskan mengenai ideologi dan dasar negara kita Pancasila. Tamansiswa berideologi Pancasila. Pada kongresnya 1984, Tamansiswa menegaskan asasnya yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Ciri khas dari Tamansiswa adalah *Pancadharma*, yaitu meliputi *Kodrati Alam, Kemerdekaan, Kebudayaan, Kebangsaan, Kemanusiaan*. Para tokoh Tamansiswa pada Kongres Tamansiswa 1984 menegaskan ideologi Tamansiswa adalah Pancasila yang berarti sejalan dengan Pancadharma Tamansiswa.

Persatuan: Bukan Persatean

Indonesia memiliki tidak kurang dari 750 sukubangsa, bahkan ada yang mengatakan, tanpa catatan jelas dan rinci, mencapai lebih dari 1.000 sukubangsa. Apa yang dapat saya sajikan adalah catatan pada tahun 1995 sebagaimana dapat diperiksa pada *Lampiran*, jumlah sukubangsa sebanyak 506.

Dari sukubangsa-sukubangsa yang satu sama lain berbeda-beda dan diekspresikan dengan istilah "*bhinneka*", kemerdekaan nasional Indonesia telah menjadikannya "*tunggal ika*". Cita-cita "persatuan" Indonesia (kemudian menjadi Sila ke-3 Pancasila) adalah suatu idaman lama. Perlunya kebhinnekaan ditransformasikan menjadi "*ketunggalikaan*" telah diantisipasi oleh Mohammad Hatta pada tahun 1932, 81 tahun yang lalu. Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh perintis perjuangan kemerdekaan, menyatakan²⁾: "... tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan...dengan persatuan kita maksud persatuan bangsa, satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi...di dalam pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat pelbagai paham politik...dan kalau datang marabahaya yang menimpa pergerakan, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan-hati, di sanalah kita harus berdiri sebaris...kita menyusun 'persatuan'...kita menolak 'persatéan'..."

Ketokohan Hatta sebagai anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda dan kemudian menjadi ketua perhimpunan ini, sebagaimana dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, terwujud dari sikap proaktif Hatta dalam ikut melahirkan "Manifesto Politik" Perhimpunan Indonesia 1925 (yang dipersiapkannya sejak 1923), sebagai *Zeitgeist*.³⁾ Manifesto Politik ini menegaskan bahwa tanpa *persatuan* dan *kesatuan* mustahil perjuangan kemerdekaan akan berhasil.

Oleh karena itu ketika 13 tahun kemudian, pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di BPUPKI dan kemudian pidato itu diberi judul "Lahirnya Pancasila", langsung oleh Hatta disambut sebagai dasar "*persatuan-hati*" yang ia idamkan sejak tahun 1932, agar "persatuan" tidak sekedar menjadi persatéan. Dengan demikian Pancasila menjadi *common denominator* (suatu "penyebut" yang sama dalam angka-angka

²⁾ Lihat *Daulat Ra'jat*, 20 April 1920.

³⁾ Sartono Kartodirdjo berulang kali menyatakan pendapatnya bahwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan *amplification* dari Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia 1925, lihat Sri-Edi Swasono (ed.) *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2002), hlm. 633.

pecahan), yang mentransformasikan “kebhinnekaan” menjadi “ketunggalikaan”.

Pancasila: Asas Bersama

Pancasila adalah suatu *common denominator* bagi Indonesia dan sekaligus sebagai *Weltanschauung*-nya⁴⁾ Indonesia merdeka.

Pancasila bukan wahana, tetapi ruh atau “hatinya bangsa” (Soekarno) atau “persatuan hatinya bangsa” (Hatta) yang harus tetap hidup sebagai dasar negara. Tanpa Pancasila Indonesia tidak akan ada.

Di atas Pancasila sebagai Dasar Negara berdirilah Pilar-Pilar berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Dasar Negara mendukung Pilar-Pilar dan memberi warna kepada keempat Pilar yang ditegakkannya yaitu: *pertama*, Sumpah Pemuda & Proklamasi Kemerdekaan, sebagai pesan eksistensial tertinggi (*de hoogste beslissing*); *kedua*, UUD 1945; *ketiga*, NKRI; dan *keempat*, Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa Pancasila sebagai Dasar, maka Pilar-Pilar itu akan mengambang, *éla-élo*, akan terombang-ambing oleh ombak dan godaan-godaan.

Dengan neoliberalisme yang dipelihara Pemerintah saat ini, yang tanpa rasa risih masih diajarkan secara luas di kampus-kampus kita, makin berkembanglah sikap mengabaikan dan meremehkan Pancasila. Berbudaya Pancasila dalam penyelenggaraan Negara makin tersingkirkan.

Pancasila ibarat “penyebut yang sama” (*common denominator*) bagi multietnisitas dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat $\frac{1}{2}$ tidak akan terjumlahkan dengan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$ manakala ketiganya tidak tertransformasikan dalam penyebut yang sama, yaitu $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{6}{12}$, $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{4}{12}$ dan $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{3}{12}$. Tanpa ruh atau penyebut yang sama maka “persa-

⁴⁾ Pancasila sebagai *Weltanschauung* atau *philosophische-grondslag* Indonesia. Jerman di zaman Hitler memiliki *national-sozialistische Weltanschauung*. Uni Soviet di zaman Lenin mempunyai *Marxistische Weltanschauung*. Dai Nippon didirikan di atas *Tennoo Koodoo Seishin Weltanschauung*. Ibn Saud mendirikan Arabia dengan *Weltanschauung* berdasarkan atas agama. Lihat Pidato Soekarno pada Sidang BPUPKI 1 Juni 1945 (Lahirnya Pancasila).

tuan” hanya akan menjadi “persatéan”. Pancasila mentransformasi *kebhinnekaan* menjadi *ketunggalikaan*.

Oleh karena itu Pancasila adalah “asas bersama” bagi yang *bhinneka* agar menjadi *tunggal-ika*. Pancasila adalah doktrin kebersamaan.

Keterjerumusan kita pada neoliberalisme antara lain berdasar untung-rugi ekonomi telah mempertajam ketimpangan teritorial, merenggangkan persatuan hati, merusak rasa-bersama dan kebersamaan sebagai keluarga besar, dengan akibatnya mempererang kohesi nasional.

Tantangan Kontemporer: Pernyataan Kemerdekaan

Nasionalisme tidak akan pernah usang.⁵⁾

⁵⁾ Kebangsaan atau nasionalisme adalah kesepakatan kita bersama yang sejak kita memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam menghadapi globalisasi, inti dari nasionalisme tidak berubah, artinya kepentingan nasional adalah utama dan diutamakan, tanpa mengabaikan tanggungjawab global. Nasionalisme tetap inklusif dengan kepentingan bersama global, mengemban persatuan bangsa-bangsa, menjadi kebersamaan hidup di dunia, menjaga kelestarian bumi tempat hidup bersama, menjaga kelestarian bumi tempat hidup bersama, dengan *the brotherhood of men* sebagai ruh mondial.

Nasionalisme tidak pernah usang, nasionalisme tetap menjadi identitas setiap anak bangsa. Nasionalisme adalah kebanggaan nasional apapun “isme” yang disandangnya. Nasionalisme yang luntur akan melunturkan identitas dan memperlemah kebanggaan nasional. Nasionalisme sebagai ideologi mengambil bentuknya dalam berbagai sikap dan perilaku, saya kutipkan berikut ini, antara lain:

Rene de Clercq (awal Abad 20): “...hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari karya, dan karya itu adalah usahaku...” (dikutip Bung Hatta dalam pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928).

Nasionalisme Jerman (1920-an): “...Deutschland über Alles... du bist Nichts, deine Volks ist Alles...”.

Mohammad Hatta (1928) pada usia 25 tahun, sambil berdiri menuding Majelis Hakim: “...lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain...” (Pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928).

Soekarno (1930): “...imperialisme berbuahakan ‘negeri-negeri mandat’, ‘daerah pengaruh’... yang di dalam sifatnya ‘menaklukkan’ negeri orang lain, membuahakan negeri jajahan... syarat yang amat penting untuk perbaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah Kemerdekaan Nasional...” (Pembelaan di Pengadilan Bandung).

Jenderal MacArthur (Perang Dunia II): “...In war there is no substitute for victory...” (Dalam perang kemenangan tidak tergantikan).

Inilah nasionalisme Ki Hadjar. Pada tahun 1928 Ki Hadjar menyatakan:

"...Pengajaran harus bersifat kebangsaan Kalau pengajaran

Pemuda-pemuda Indonesia dalam Perang Kemerdekaan: *"...Merdeka atau mati..."*.

Patrick Henry: (untuk Prajurit Amerika dalam Perang Kemerdekaan Melawan Inggris), *"...Give me liberty or give me death..."* (berilah kami kemerdekaan atau kami memilih mati).

John F. Kennedy (1961): *"Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kalian; tanyalah apa yang bisa kalian berikan untuk negara"*.

Joan Robinson (1962): *"... Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme ... Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan ... Para penganut mazhab klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia..."*.

Ho Chi Minh (awal 1970-an): *"...Kami akan menang perang... kami mempunyai senjata rahasia, yaitu nasionalisme..."*.

Leah Greenfeld (2001): *"... Meskipun ada yang mengatakan bahwa dewasa ini kita berada pada masa kapitalisme tahap lanjut, dan bahkan mungkin telah mencapai tahap pascaindustrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme... tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera menghilang... Nasionalisme pertama kali muncul di Inggris dan telah sangat mempengaruhi pandangan masyarakatnya ... ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan dari suatu perekonomian modern ternyata tidak berlangsung secara berkelanjutan dengan sendirinya (tidak self-sustained), tetapi pertumbuhan hanya akan berkelanjutan jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme ..."*.

Sartono Kartodirdjo (2000): *"...Nasionalisme bukan proyek (bukan 'imagined nation'-nya Ben Anderson)... nasionalisme adalah semangat kemandirian dan persatuan bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Manifesto Politik Perhimpunan Kedaulatan 1925..."*.

Ian Lustic (2002): *"...Nasionalisme merupakan suatu kekuatan pembangunan yang tak ada tandingannya di dunia masa kini..."*.

Meutia Hatta (2006): *"...Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan segala alasan dan tuntutan yang rasional dan sah, tidak ada hal lain bagi kita kecuali untuk mempertahankannya tanpa lelah. Nasionalisme tidak saja indah, memberikan harga diri, percaya-diri dan jati-diri, tetapi juga harus disyukuri sebagai karunia Tuhan..."*.

HAR Tilaar (2009): *"...Nasionalisme dalam masyarakat Indonesia perlu digalakkan kembali apabila kita ingin memelihara tetap hidupnya bangsa dan negara Indonesia..."*.

Widjojo Soejono (2011): *"...negara-bangsa merupakan dan akan tetap menjadi wujud realistik dan final dari institusi manusia di muka bumi... kewaspadaan adalah harga kemerdekaan yang setiap nasionalis siap untuk membayarnya..."*.

bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita...”.

Bila saat ini kita merasakan tentang melunturnya nasionalisme sebagaimana saya singgung pada pendahuluan. Saat ini kita telah melihat banyak contoh bahwa banyak di antara anak-anak muda kita “telah menjadi lawan kita”, dalam arti mereka mengagumi dan gandrung dengan yang serba asing, mereka lupa kepentingan nasional khususnya kecintaan pada Tanah-Air, kepada produk-produk dalam-negeri. Lebih khusus lagi (semoga tidak dianggap berlebihan) anak-anak muda kita mencoreng-moreng kota bahkan neighbourhood mereka sendiri sebagai ekspresi *graffiti* penuh kekonyolan, cermin hilangnya kecintaan pada Ibu Pertiwi.

Pernyataan Kemerdekaan adalah Pernyataan Budaya

Barangkali ada baiknya kita menoleh ke belakang, untuk memahami makna “pernyataan kemerdekaan”.

Saya ingin menegaskan di sini, bahwa “Proklamasi Kemerdekaan” adalah “Proklamasi Budaya”. Artinya “pernyataan kemerdekaan” tak lain dan tak bukan adalah suatu “pernyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berkandungan kesadaran berdaulat, melepaskan diri dari ketergantungan dan dari belas-kasih penjajah – budaya *onafhankelijkheid*, suatu pernyataan peneguhan sikap budaya yang menolak perhambaan, mengemban keberanian melepaskan diri dari kepatuhan sebagai “*koelie* di negeri sendiri”, sekaligus berke- teguhan untuk tidak ragu menjadi “tuan di negeri sendiri”, yang kesemuanya merupakan pernyataan budaya untuk meninggalkan ketertundukan dan melepas *underdog mentality*-nya kaum *Inlander*.

Kesadaran-kesadaran berdaulat, mandiri, berharkat-mar- tabat, berkehidupan cerdas (tidak sekedar berotak cerdas), tangguh, digdaya, dan mandraguna, merupakan “tuntutan bu- daya” yang harus dipenuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaannya. Namun sangat disayangkan kita

telah gagal melakukan *unlearning* (*afleren*), gagal merubah *mindset*, untuk memenuhi "tuntutan budaya" (dan "tugas budaya") fundamental ini. Kita telah lengah-budaya (*culturally ignorant*) tidak segera menggariskan "strategi budaya" sebagai keharusan bagi bangsa yang merdeka. Mestinya "budaya merdeka" tergariskan sebagai suatu keutamaan dalam proses formulasi strategi pembangunan nasional, untuk mendorong proses *cultural unlearning* itu.

Kita alpa tidak menggariskan suatu strategi budaya untuk memaknai kemerdekaan. Kita lengah-budaya dengan menerima liberalisme dan kapitalisme. Kita terjerumus mengejar-ngejar *to have more*, lupa mengejar *to be more*. Kita membiarkan pembangunan nasional hanya mengejar 'economic added value'. Pembangunan nasional seharusnya mengejar pula 'socio-cultural added value' agar mampu meraih *to be more* itu. Akibatnya kita lihat pembangunan hanya menghasilkan *GDP growth* (itu pun cuma 5,6 %). Pembangunan seharusnya mengutamakan 'daulat rakyat', bukan mengutamakan 'daulat pasar'-nya neoliberalisme dan kapitalisme. Sementara itu sebaliknya kita malahan kehilangan kedaulatan nasional: kita tidak berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industri, ekspor-impor, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bumi/air/kekayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legislasi. Bagaimana ketakberdaulatan dan keterjajahan ini bisa terjadi? Lalu apa sebenarnya yang kita ajarkan di ruang-ruang klas fakultas-fakultas ekonomi kita di Indonesia? (Salah asuhankah para anak-didik kita, kita abai akan pendidikan karakter mengabdikan kepada Ibu Pertiwi).

Kita tidak anti asing (tidak *xenophobic*), tetapi kita tidak boleh membiarkan dan bahkan harus menolak bahwa ekonomi asing mendominasi ekonomi nasional. Globalisasi harus dengan tegar kita hadapi, sambil tetap menyadari bahwa globalisasi bukanlah ajang penyerahan kedaulatan ke kekuatan-kekuatan global.

Lebih lanjut mengenai makna pernyataan kemerdekaan sebagai pernyataan budaya, salah satu bentuknya adalah tuntutan untuk merubah diri sendiri yang di masa jajahan merupakan kaum *Inlander* (Pribumi - kelas terendah) yang

berada di bawah kaum *European* (kulit putih – kelas teratas) dan kaum *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing – kelas di tengah), agar saling menjadi kaum-kaum yang setara. Indonesia Merdeka dalam konstitusinya menyatakan: “...tiap-tiap warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya...”. Dengan kata lain, *égalité* sebagai tuntutan peradaban mulia telah sejak awal kemerdekaan kita ditegaskan di situ, yaitu dalam konteks keindonesiaan, merubah sikap budaya dari “kami” dan “mereka”, menjadi “kita”.

Lagi-lagi terbukti tidak mudah melaksanakan *cultural unlearning* itu. Seperti kita lihat kita tetap minder sebagai *Inlander*, tetap mudah kagum terhadap yang serba western berikut gebyar-gebyar globalisasi yang menyertainya. Sebagian terbesar dari kita tetap saja merasa sebagai *het zaachste volk ter aarde, een koelie onder de volkeren* – bangsa terlemah di muka bumi dan merupakan kulinya bangsa-bangsa lain. Akibatnya “modernisasi” sering diartikan sebagai “westernisasi”, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai tuntutan “eksklusivisasi parokhial” yang justru mengutuk modernisme dan mendekatkan pada puritanisme fundamental yang *suicidal*.

Kolonialisme sebagai peradaban ganas dalam wujud penaklukan, penistaan, humiliasi dan penindasan hak-hak dasar manusia terhadap rakyat Nusantara di masa lalu, telah membentuk *mindset* ketertundukan dan disorientasi sosial-budaya yang dalam massif.⁶⁾ Di sini terbentuk negara jajahan yang diberi nama Hindia-Belanda (Nederlands-Indië) dengan Gubernur Jenderal-nya yang memangku *exorbitanterechten* sebagai dasar memerintah yang menisbikan humanisme dengan kesewenang-wenangan brutal otoritarian yang diterapkan terhadap anak-negeri bumi-putra. Namun, bagaimanapun juga kolonialisme di Hindia-Belanda ini ikut meneguhkan “rasa bersama” melalui persistensi perlawanan dari para kelompok

⁶⁾ Lihat Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan: Ekonomi dan Budaya*, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 19 Desember 2013 (Yogyakarta: UGM- Press, 2013).

kecil perintis dan pejuang kemerdekaan, dengan mengumandangkan tentang Sang Penjajah sebagai *the common enemy*, melalui liku-liku kesabaran dan ketekunan, yang kemudiannya pada tahun 1928 membentuk nilai-nilai “kebersamaan nasional”.

Pasal 31 UUD 1945

Ki Hadjar Dewantara adalah Ketua Panitia Kecil Bagian Pendidikan dan Pengajaran pada BPUPKI, dengan anggota-anggotanya Prof. Dr. Hoesain Djajadiningrat, Prof. Dr. Asikin, Prof. Ir. Rooseno, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Kyai Hadji Masjkoer, yang menghasilkan Pasal 31 UUD 1945: (1). Tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran; (2). Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 UUD 1945 menyatakan: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional.⁷⁾

Ujian Nasional

Dari Pasal 31 (ayat 2) di atas jelas bahwa isu kontemporer yang mengemuka saat ini adalah Ujian Nasional. Tamansiswa menganggap Ujian Nasional terkait dengan tugas konstitusional dengan kata-kata kunci “mengusahakan dan menyelenggarakan satu satu sistem pengajaran nasional” yang maknanya sangat luas

⁷⁾ Memajukan kebudayaan nasional dikaitkan oleh Meutia Hatta dengan tugas pemerintahan negara untuk *mencerdaskan kehidupan bangsa*, saya kutipkan: “...mencerdaskan kehidupan bangsa adalah konsepsi budaya, bukan konsepsi biologis-genetika. Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih jauh dari sekedar mencerdaskan otak bangsa. Kehidupan bangsa inilah yang harus dicerdaskan, artinya tidak hanya melawan kebodohan sosial (*social foolishness*), tetapi juga melawan keterbelakangan sosial (*social backwardness*), feodalisme dan patronasi eksploitatif. Mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ditegaskan oleh seorang *founding father*, adalah menghilangkan mentalitas inlander (yang saya artikan sebagai *underdog mentality*). Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita *tidak lagi* buta ketaqwaan, buta aksara, buta seni-budaya, buta peradaban, buta sejarah, buta geografi, buta spasial, buta ideologi, buta persatuan (kebangsaan), buta kebersamaan (kerakyatan), buta solidaritas, buta iptek, buta kedaulatan, buta kemartabatan, buta kesetaraan (termasuk kesetaraan *gender*, status), buta modernisasi, buta humanisme¹⁾. Dengan demikian mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tuntutan modernisasi dan peradaban sebagai khalifatullah”. Meutia Hatta, Dengar Pendapat Umum, Komisi X DPR-RI, “Beberapa Catatan: Masukan untuk RUU Kebudayaan”, Jakarta, 23 Februari 2011.

dan mendasar. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari Sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia).

Kita berpegang teguh kepada doktrin Bhinneka Tunggal Ika di mana *kebhinnekaan* Indonesia harus dapat ditransformasi menjadi *ketunggal-ikaan* (kita memiliki begitu banyak kebhinnekaan etnik dan kultur – lihat *Lampiran*). Satu sistem pendidikan nasional adalah bagian upaya transformatif membentuk *ketunggalikaan* dari *kebhinnekaan* itu. Ujian Nasional adalah untuk membentuk *mindset* nasional Indonesia (minimal dengan mengutamakan pengetahuan tentang sejarah Indonesia dan ilmu bumi Indonesia), yang tidak seharusnya direduksi menjadi masalah *remeh-temeh* tehnik penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian di lapangan. Demikian pula apa-apa saja yang harus diujikan. Standardisasi pendidikan nasional adalah salah satu segi, dan membentuk *mindset* keindonesiaan sebagai bagian dari *nation and character building* adalah segi lainnya, yang justru merupakan titik-tolak utama. Bukankah persatuan Indonesia menjadi kukuh, di samping kesatuan pendidikan juga oleh adanya kesatuan TNI dan POLRI (dengan NRP-nya), kesatuan Pegawai Negeri (dengan NIP-nya), kesatuan keuangan negara (dengan mata uang tunggal Rupiah dan NPWP-nya), kesatuan territorial Pos (dengan Kode Pos-nya)? Kesatuan-kesatuan lainnya pun yang tak terhitung jumlahnya telah diperlukan, sadar ataupun tak sadar, untuk menegaskan satu keindonesiaan.

Caturdharma Pendidikan Tinggi

Sejak undang-undang pendidikan tinggi pertama yang kita miliki (UU No. 22 Tahun 1961 dan kemudian diulangi pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita menegaskan tentang Tri Dharma Pendidikan Tinggi sebagai fungsi pendidikan tinggi Indonesia, yaitu: (1). Pendidikan/Pengajaran; (2). Penelitian; dan (3). Pengabdian kepada masyarakat.

Tamansiswa yang merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat, demikian pula buah pikir mendasar dari Ki Hadjar tentang pendidikan sebagai sarana pembudayaan, maka sebenarnya secara implisit Tamansiswa

mengajukan "Caturdharma Pendidikan Tinggi" yang meliputi: (1). Pendidikan/Pengajaran; (2). Penelitian; (3). Pengabdian kepada Masyarakat; (4). Pendidikan tinggi sebagai pusat pengembangan kebudayaan nasional.⁸⁾ H.A.R. Tilaar (2012) secara eksplisit menegaskan pentingnya kita berpedoman pada Caturdharma Pendidikan Tinggi. Sesuai dengan tuntutan pedagogi kontemporer yang justru berasal dari pemikiran Ki Hadjar. Identitas Indonesia tidak harus terlumpuhkan oleh globalisasi budaya. Memperkukuh keindonesiaan adalah bagian dari isu global tentang perlu dihindari terbentuknya *the lonely crowd* dan sekaligus menegaskan apa yang dikemukakan oleh Huntington (1996) tentang "culture matter". Kita tidak seharusnya menelan mentah-mentah doktrin ilusif tentang "the end of nation states", "the borderless world", "the end of history" dan lain-lain semacamnya⁹⁾.

⁸⁾ Ide Caturdharma bukanlah ide baru. Di samping secara implisit muncul dalam tulisan-tulisan Ki Hadjar juga muncul pula pada Pidato Presiden Universitas Indonesia (Prof. Mr. Dr. Soepomo) pada Dies Natalis Ketiga Universitas Indonesia pada 16 Februari 1953 di Bandung, dikemukakan oleh Prof. Soepomo kalimat-kalimat kunci: Universitas harus merupakan "badan pusat *kebudajaan* dan badan pusat *international understanding*"; "mufakat dengan hasrat Pemerintah untuk *mengindonisir* staf guru-besar Universitas"; "hal yang sangat penting adalah soal *pendidikan rohani* didalam dunia Universitas"; "fungsi yang terpenting dari Universitas ialah pendidikan *Manusia*, memperkembangkan sifat *Manusia* didalam tiap2 mahasiswa"; "supaja para mahasiswanja bukan sadja mendjadi orang *gunawan*, melainkan djuga dan terutama mendjadi orang *budiman*, penuh bertanggung djawab terhadap *kebahagiaan nusa dan bangsanja*"; "bagaimana *budi-pekeria* dari para mahasiswa dapat terpelihara dengan semestinja"; "memadjukan '*human understanding*' dan semangat '*mutual service*' diantara para mahasiswa"; "membantu Pemerintah dalam usahanja untuk memenuhi kebutuhan masjarakat akan tumbuhnja *kebudajaan* baru"; "marilah kita ikut serta memimpin proses *re-integrasi* di negara dan masjarakat Indonesia dengan terutama membangun dikalangan Universitas kita sendiri sikap hidup yang luhur, sesuai dengan filsafat *Pantja Sila*".

⁹⁾ Saya akan menggambarkan globalisasi dari segi yang relevan dengan judul Orasi ini, sebagai berikut:

"...Dalam keadaan dunia semakin terglobalisasi... akan terjadi kerusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis..." (Huntington, 1996). "...Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika..." (H. Kissinger, 1998). "...Dari segi kultural globalisasi telah cenderung meliputi meluasnya (demi perbaikan ataupun pemburukan) Amerikanisasi..." (T. Friedman, 2001). "...Dunia akan memiliki ekonomi global tanpa pemerintahan global... saat ini kita memiliki ekonomi global tanpa masyarakat global..." (G. Soros, 1998). "...Globalisasi adalah

World Class Education

Dalam rangka memperkuat keindonesiaan (saya gunakan istilah *Indonesianism*), pendapat saya adalah: kita tidak perlu terpancing oleh rongrongan untuk mengikuti salah pikir tentang *world class education*. Bagi saya biarlah kita mengirimkan anak-anak muda kita ke tempat-tempat di mana *world class educations* tersedia, entah di Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Erasmus Universiteit Rotterdam, Delf, École Nationale Supérieure Paris, ataupun di konservatori-konservatori art dan musik di Eropa.

Saya merasa tidak tepat *world class education* diadakan dengan cara mengundang Harvard University atau universitas-universitas terkemuka di luar negeri mendirikan cabangnya di Indonesia. Mereka cukup bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia. Sementara itu saya mengidamkan Indonesia mendirikan *world class universities*-nya di Indonesia, tentang apa yang spesifik Indonesia, di mana orang-orang mancanegara belajar di Indonesia karena kekhasan ini. Indonesia harus memiliki universitas unggul, katakanlah yang *world class* dalam *volcanology* karena Indonesia yang berada pada *ring of fire* yang paling tahu akan *volcanology*. Demikian pula mahasiswa dari luar-negeri harus belajar di Indonesia karena kita yang akan memiliki *world class university* untuk *rain forest*, di sini pulalah akan lahir *world class universities* mengenai *archipelago, marine biology, deep sea, fishery, inter-island transportation* dan *inter-island economics, tropical disease, tropical medicine* dan selanjutnya. Masih banyak lagi *world class*

imperialisme ekonomi baru..." (Petras & Veltmeyer, 2001). Tetapi globalisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi Amerika ataupun Amerikanisasi yang sederhana, "...globalisasi telah menciptakan perang dagang..." (Krugman, 2001), bahkan saat ini, "...telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan..." (Swasono, 2010). "...Cara bagaimana globalisasi telah ditatalaksana...perlu secara radikal dipikirkan ulang... membuat globalisasi bekerja merupakan langkah-langkah berikutnya untuk memujudkan keadilan global..." (Stiglitz, 2007), atau, sebagaimana kita saksikan adalah "...ekonomi terjun bebas made in Amerika... tentang pasar-bebas yang terkait dengan tenggelamnya ekonomi dunia..." (Stiglitz, 2010). Dalam brutalitas pasar-bebas saat ini kebenaran tibanya jaman pertenggaran terbukti: "Asu gedhé menang kerahé" – *anjing besar memenangkan pertarungan (primbon Jawa)*.

educations khas Indonesia bisa didirikan, terutama menyangkut linguistik dan *traditional musicology*.

Pendidikan Karakter

Perlunya pendidikan karakter sudah lama dibicarakan di kalangan kaum intelektual pendidik.¹⁰⁾ Bahkan akhir-akhir ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengharapkan Tamansiswa berada di garis depan dalam pendidikan karakter bangsa.

Di lingkungan kaum nasionalis, tak terkecuali tentunya Tamansiswa, kita mengenal pendidikan karakter. Saya selaku Ketua Umum Tamansiswa mencoba mengeksplisikannya sebagai berikut:

- Pendidikan untuk membentuk dan mempertegas *jati-diri*.
- Pendidikan untuk mempertebal *harga-diri*.
- Pendidikan untuk memperteguh *percaya-diri*.¹¹⁾
- Pendidikan mempertebal *iman*.¹²⁾
- Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya *saling menghormati, ber-unggah-ungguh, ber-sopan-santun*.
- Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan *ber-toleransi, menghormati* dan *menghargai perbedaan*.
- Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya *bersahabat, ramah, tolong-menolong (friendly)* dan *menghargai friendliness*.
- Sabar, mampu mengendalikan emosi.¹³⁾
- Pendidikan menumbuhkan kepekaan estetika dan artistika untuk membentuk sikap kritis, apresiatif dan kreatif.

¹⁰⁾ Pejuang tulen adalah segolongan intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual adalah orang yang mampu melihat keganjilan. Intelektual tidak harus orang yang menyandang gelar-gelar akademis, bukan pula harus seorang guru besar. Dia adalah orang yang selalu resah, terusik oleh ketangguhan budi dan gagasannya yang memampukannya melihat keganjilan di sekitarnya. Dia senantiasa terdorong meluruskan keganjilan yang mengusik keanggunan hidup dalam kebersamaan dengan perbuatan, menghindari utopia. Dia adalah patriot karena ia melihat keganjilan tentang penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Kebenaran baginya adalah loyalitas tunggal: hanya patuh kepada tuntutan Ibu Pertiwi.

¹¹⁾ Ketamansiswaan: *ngandel-kendel-bandel-kandel* (percaya kepada Yang Maha Kuasa, percaya diri, berani karena benar, tahan banting, tidak mudah berputus asa).

¹²⁾ Ketamansiswaan: *tetep-antep-mantep*.

¹³⁾ Ketamansiswaan: *ning-neng-nung-nang* (dengan fikiran yang hening, tenang, diam mengendalikan emosi, teguh hati, akhirnya memperoleh kemenangan).

- Pendidikan membentuk karakter tangguh sebagai bangsa menjadi ber-harkat-martabat, ber-jati-diri (*Gestalt* keindonesiaan), *digdaya* dan *mandraguna* dalam rangka *nation and character building*.
- Pendidikan untuk memperkuat rasa Kebangsaan (nasionalisme) dan Kerakyatan (tahta untuk rakyat).
- Pendidikan memantapkan kesadaran geografis (*territorial awareness*) untuk mengenal keberadaan diri/*ground zero* dan kesadaran sejarah (*survival awareness*) untuk memperkuat jati-diri bangsa.
- Pendidikan "mencerdaskan kehidupan bangsa" (konsepsi budaya), tidak sekedar untuk "mencerdaskan otak bangsa" (konsepsi biologis-genetika), menghilangkan ke-*minderwaardig-an* (*servility, underdog mentality*).
- Pendidikan mengangkat kemampuan bangsa untuk *proaktif ikut mendesain masa depan* dunia.
- Pendidikan untuk mendorong proses "modernisasi", yang tidak identik dengan "westernisasi", tetapi sebaliknya modernisasi adalah untuk mempertegas keindonesiaan.
- Pendidikan untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila.

Dengan butir-butir di atas, tantangan pendidikan karakter sangatlah penting dan luas tantangannya. Guru, baik yang aktif maupun yang sudah pensiun, ataupun para pendidik dalam arti luas perlu menuangkan pengalamannya untuk mengisi tuntutan butir-butir di atas. Saat ini kita masih berpegang teguh pada konsepsi Tri Sentra Pendidikan. Namun dalam perubahan zaman yang sangat cepat pendidikan oleh dan diperoleh dari *Keluarga* menghadapi kendala yang besar. *Keluarga* memerlukan pendidikan untuk mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Maka meningkatlah tuntutan terhadap fungsi "keayahbun-*daan*" (*parenting dan parenthood*). Peran orang-orang berpengalaman dalam *parenthood* sangat diperlukan tak terkecuali seperti misalnya Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan.

Seluruh Pembangunan

Kita tidak anti asing, tetapi kita tidak boleh membiarkan dan harus menolak ekonomi asing mendominasi ekonomi na-

sional. Globalisasi bukan ajang penyerahan kedaulatan. Antara lain, sebagai satu contoh, kita harus menegaskan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN harus tetap merupakan forum kerjasama, bukan forum persaingan dan pertarungan apalagi pengangkangan dan ajang perampokan predatorik aset dan kepentingan nasional kita. Seharusnya kita tidak perlu cemas sebagaimana dicemaskan Wakil Bupati Sleman (17/10/14): "...jangan heran orang-orang Singapura nanti berjualan buah di Sleman... jangan kaget orang-orang Malaysia berjualan di pasar tradisional kita...". Kita harus selekasnya mengoreksi kelengahan-budaya ini dengan mengakhiri servilisme diri. Keterjajahan pikiran (*mindset*) ini seharusnya menumbuhkan perlawanan, bukan kepasrahan, selama nasionalisme masih di kandung badan. Kita harus tegas menolak dan tidak memberi izin kepada pedagang dan investor asing manakala kepentingan rakyat dan negara terancam. Pemda bisa menggusur PKL rakyat sendiri, bisa menggusur kios-kios pribumi, melarang kehadiran pedagang kecil pada lokasi tertentu dengan seribu alasan, menggusur orang miskin dan bukan menggusur kemiskinan, mengapa tidak bisa melarang pedagang atau investor asing yang mematikan usaha-usaha anak-negeri.

Seluruh yang akan saya sampaikan sebagai berikut:

Anda belum Tamansiswa kalau tidak tergetar dan berontak hati ketika anda melihat di jalanan gerobak motor saja *kok* diimpor. Padahal kita punya ribuan SMK unggul, kita punya ratusan sekolah tinggi teknik dan teknologi belum terhitung politeknik yang ada. Ternyata bukan hanya pikiran kita yang tidak mampu peka akan keganjilan konyol semacam ini, tetapi juga nasionalisme dan jiwa mandiri kita telah meleleh.

Anda belum Tamansiswa kalau anda malah ikut ber-dandang ria melihat resto-resto asing menjajakan makanan asing dengan kandungan impor yang tinggi, sementara jajanan rakyat dan warung-warung makanan kita makin terpojok.

Anda belum Tamansiswa, sekedar menjadi pejabat Pemda karena andalah yang mengeluarkan izin-izin menggusuri pasar tradisional, menjadikannya *malls* dan *hypermarkets*. Ini tidak

saja sekedar proses *inferiorization* terhadap anak negeri sendiri, ini adalah awal aboriginisasi.

Anda belum Tamansiswa bila membiarkan anak-anak didik kita tidak memiliki kesadaran spasial geografi, tidak tahu di mana Miangas dan Rote sebagai batas Utara dan batas Selatan Tanah Air kita, tidak merasa kehilangan tatkala Sipadan dan Ligitan diambil secara licik oleh Malaysia, tidak peduli bahwa kita tidak berdaulat dalam tataguna tanah dan tataguna laut kita.

Anda juga belum Tamansiswa bila anda lengah mengajarkan sejarah dengan semestinya demi mempertebal identitas diri anak-anak didik kita lalu mampu menempatkan diri mereka dalam perjalanan masa dan peradaban yang menyertainya, memahami masa lampau dan masa kini sebagai modal bagi mereka untuk mendesain masa depan.

Anda belum Tamansiswa kalau anda belum mampu melihat corat-coret di tembok yang mengotori seluruh kota sebagai suatu keganjilan dan kelengahan budaya yang berbahaya, yang kelanjutannya hilangnya cinta lingkungan, cinta keindahan dan cinta tanah air. Di mana para pendidik, khususnya para ahli *paedagogie* dan *psycholoog* Tamansiswa, seharusnya mereka menyetop *graffiti* norak yang mengotori lingkungan perkotaan kita. Adalah kegagalan kita bahwa anak-anak muda kita salah jalan dan terseok-seok mencari identitas-diri dan kebanggaan-diri sebagai warganegara Indonesia. Tidak ada tembok dan bangunan yang bersih dari corat-coret anak muda, suatu *graffiti* salah esensi dan ekspresi nihil untuk mencari pengakuan eksistensi terhadap keterlantaran sosial-kultural, yang juga menggambarkan *neighborhood's decline*. *Graffiti* jorok itu bisa pula diartikan sebagai ketiadaan cinta *neighborhood* di mana mereka hidup dan memperoleh kehidupan, ketiadaan cinta lingkungan atau barangkali kedangkalan akan kesadaran nasional.

Anda belum ekonom yang namansiswani bila anda membiarkan "daulat pasar" menggusur "daulat rakyat".

Mengonsumsi makanan-makanan asing, *ngerumpi* di kafe-kafe asing adalah imitatif untuk merasa modern atau agar terkesan maju seperti orang Barat, barangkali bagian dari perjuangan memperoleh identitas-diri dan eksistensi ilusif yang

delusif. Sementara itu negara tidak memberikan kepada mereka suatu kebanggaan nasional.

Ini semua adalah kesalahan kita dan barangkali dosa kita terhadap para anak muda yang tidak kita bina dengan baik bahkan kita lalaikan. Sebelum terlambat kita harus segera mengangkat untuk menolong mereka dan menjadikan mereka bunga-bunga bangsa dan kader bangsa harapan masa depan bangsa.

Di sinilah kader bangsa tangguh diperlukan, kaderisasi lebih intens diperlukan, yang tua bisa rela *lengser keprabon madeg pandhito* manakala tuntutan urgensi mulai menghendaki.

Penutup

Tamansiswa menerima tantangan kontemporer yang sebagaimana dikemukakan di atas. Ketamansiswaan adalah keindonesiaan untuk bergaul dengan globalisasi atau untuk melawan globalisasi manakala kepentingan nasional dalam bahaya.

Berlaku gospel "bebas-aktif" dalam pergaulan internasional. Globalisasi adalah percaturan internasional intensif. Pedoman kita tegas: dalam menghadapi globalisasi Tamansiswa berpedoman pada SBII (Sifat, Bentuk, Isi, Irama). Sifat tidak boleh berubah, namun Bentuk, Isi, Irama boleh berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam nasionalisme dan patriotisme Indonesia bertemu Soekarno, Hatta dan Ki Hadjar pada satu titik ideologi nasional, yaitu Kebangsaan dan Kerakyatan berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan. Ini "sifat" yang tidak boleh berubah. Maka diktum nasional kita tegas: mengutamakan kepentingan nasional tanpa mengabaikan tanggungjawab global.

Lampiran

DAFTAR SUKUBANGSA-SUKUBANGSA DI INDONESIA (SELURUH INDONESIA, 27 PROVINSI, 1995)

1. Bali: (4)

Bali, Loloan, Nyama Selam, Trunyan.

2. Bengkulu: (9)

Bengkulu, Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Pekal, Rejang, Serawai, Suban.

3. D.I. Aceh/NAD: (11)

Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Gayo-Lut, Gayo Luwes, Gayo Serbejadi, Kluet, Simeulu, Singkil, Tamiang.

4. DIY: (1)

Yogyakarta.

5. DKI: (1)

Betawi

6. Irian Jaya: (109)

Aero, Airo Sumaghaghe, Airoran, Ambai, Amberboken, Amungme, Anu, Arfak, Asmat, Auyu, Ayfat, Baso, Baudi, Berik, Bgu, Biak, Borto, Buruai, Citak, Damal, Dani, Dem, Demisa, Demta, Dera, Edopi, Eipomek, Ekagi, Ekari, Emumu, Eritai, Fau, Foau, Gebe, Gres, Hattam, Humboldt, Hupla, Inanwatan, Irarutu, Isirawa, Iwur, Jaban, Jair, Kaburi, Kaeti, Kais, Kalabra, Kamberau, Kamoro, Kapauku, Kapaur, Karon, Kasuweri, Kaygir, Kembrano, Kentuk, Ketengban, Kimaghama, Kimyal, Kokoda, Kmnai, Korowai, Kupol, Kurudu, Kwerba, Kwesten, Lani, Maden, Mairasi, Mandobo, Maniwa, Mansim, Manhuke, Marind Anuim, Maiyakh, Mey Brat, Mimika, Moire, Mombum, Moni, Mooi, Mosena, Murop, Muyu, Nduga, Ngnalik, Ngnalum, Nimboran, Palamul, Palata, Pisa, Sailolof, Samarokena, Sapran, Sawung, Sawuy, Sentani, Silimo, Tabati, Tehid, Timorini, Uruwai, Waipam, Waipu, Wamesa, Wanggom, Wano, Waris, Waropen, Wodani, Yahray, Wali, Yapen, Yaqay, Yei.

7. Jambi: (6)

Anak Dalam, Batin, Jambi, Kerinci, Pengkulu, Pindah.

8. Jawa Barat: (5)

Baduy, Banten, Cirebon, Naga, Sunda.

9. Jawa Tengah: (5)

Bagelen, Banyumas, Jawa, Nagariung, Samin.

10. Jawa Timur: (6)

Bawean, Jawa, Madura, Surabaya, Tengger, Osing.

11. Kalimantan Barat: (71)

Babak, Badat, Barai, Bangau, Bukat, Cempedek, Dalam, Darat, Darok, Desa, Dusun, Embaloh, Empayuh, Engkarong, Ensanang, Entungau, Galik, Gun,

Iban, Jangkang, Kalis, Kantuk, Kayan, Kayanatan, Kede, Kendayan, Keramai, Klemantan, Kopak, Koyon, Lara, Limbai, Maloh, Mayau, Mentebak, Menyangka, Menyanya, Merau, Mualang, Muara, Muduh, Muluk, Ngabang, Ngalampa, Ngamukit, Nganayatn, Panu, Pengkedang, Pampang, Pontianak, Pos, Punt, Randuk, Ribun, Sambas, Sanggau, Sani, Seberuang, Sekajang, Selayang, Selimpat, Senangkan, Senunang, Sisang, Sintan, Suhaid, Sungkung, Suruh, Tabuas, Taman, Tingui.

12. Kalimantan Selatan: (10)

Abai, Bakumpai, Banjar, Beaki, Berangas, Bukit, Dusun Deyah, Harakit, Pagatan, Pitap.

13. Kalimantan Tengah: (10)

Bantian, Bawo, Lawangan, Maanyan, Ngaju, Ot Danum, Paku, Punan, Siang, Tamuan.

14. Kalimantan Timur: (29)

Auheng, Baka, Bakung, Basap, Benuaq, Berau, Berusu, Bem, Bulungan, Busang, Dayak, Huang Tering, Jalan, Kenyah, Kulit, Kutai, Long Gelat, Long Paka, Modang, Oheng, Pasir, Penihing, Saq, Seputan, Tidung, Timai, Tou, Tukung, Tunjung.

15. Lampung: (1)

Lampung.

16. Maluku: (48)

Alune, Ambon, Aru, Babar, Bacan, Bajoe, Banda, Buli, Buru, Galela, Gane, Gebe, Halmahera, Haruku, Jailolo, Kei, Kisar, Kur, Laloda, Leti, Lumoli, Maba, Makian, Mange, Mare, Memalu, Moa, Modole, Morotai, Nuaulu, Pagu, Patani, Pelauw, Rana, Sahu, Sanana, Sawai, Seram, Tanimbar, Ternate, Tidore, Tobaru, Tobelo, Togutil, Wai Apu, Wai Loa, Weda, Wemale.

17. Nusa Tenggara Barat: (9)

Bayan, Bima, Dompu, Donggo, Kore, Mata, Mbojo, Sasak, Sumbawa.

18. Nusa Tenggara Timur: (48)

Abui, Alor, Anas, Atanfui, Atoni, Babui, Bajawa, Bakifan, Blagar, Boti, Dawan, Deing, Ende, Faun, Flores, Hanifeto, Helong, Kabola, Karera, Kawel, Kedang, Kemak, Kemang, Kolana, Kramang, Krowe Muhang, Kui, Labala, Lamaholot, Lemma, Lio, Manggarai, Marae, Maung, Mela, Modo, Muhang, Nagekeo, Ngada, Moenleni, Riung, Rongga, Rote, Sabu, Sikka, Sumba, Tetun.

19. Riau: (9)

Akit, Hutan, Kuala, Kubu, Laut, Lingga, Riau, Sakai, Talang Mamak.

20. Sulawesi Selatan: (13)

Abung Bunga Mayang, Bentong, Bugis, Daya, Duri, Luwu, Makassar, Mandar, Massenrengkulu, Selayar, Toala, Toraja, Towala-wala.

21. Sulawesi Tengah: (25)

Bada, Bajau, Balaesang, Balantak, Banggai, Bungku, Buol, Dampelas, Dondo, Kaili, Muna, Mekongga, Mori, Napu, Pamona, Pipikoro, Saluan, Sea-sea, Tajio, To Laki, Toli-Toli, Tomia, Tomini, Wakatobi, Wawoni.

22. Sulawesi Tenggara: (9)

Buton, Cina, To Laiwiu, To Landawe, To Mapute, Orang Butung, Orang Lajolo, Orang Muna, Moronene.

23. Sulawesi Utara: (20)

Bantik, Bintauna, Bolaang Itang, Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Borgo, Gorontalo, Kaidipang, Minahasa, Mongondow, Polahi, Ponosakan, Ratahan, Sangir, Talaud, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, Tontemboan, Toulour.

24. Sumatra Barat: (2)

Mentawai, Minangkabau.

25. Sumatra Selatan: (29)

Ameng Sewang, Anak Dalam, Bangka, Belitung, Enim, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lahat, Lematang, Lintang, KLom, Mapur, Meranjat, Musi, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Ogan, Palembang, Pasemah, Pedamaran, Pegagan, Rambang Senuling, Ranau, Rawas, Saling, Sekak, Semendo.

26. Sumatra Utara: (15)

Angkola, Asahan, Batak, Dairi, Deli, Karo, Langkat, Mandailing, Nias, Pakpak, Pesisir Natal, Siladang, Sumalungun, Toba, Ulu Muara Sipongi.

27. Timor Timur: (2)

Ilimano, Timor Timur.

Referensi Utama:

Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995).

Referensi Lain:

Geerland, G., *Atlas der Volkerkunde* (Gottra: Berhaus, Heinich, 1893).

Koentjaraningrat, *Atlas Etnografi Sedunia* (Jakarta: Penerbit Dian Rakjat, 1969).

Ter Haar, B., *Adat Law in Indonesia* (New York: Institute of Pacific Relations, 1948).